

URGENSI “MODERASI BERAGAMA” UNTUK MENCEGAH RADIKALISME DI INDONESIA

Bartolomeus Samho

Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Email Korespondensi samho@unpar.ac.id

ABSTRACK

This paper aims to describe the reasons behind the importance of “religious moderation” to prevent radicalism in Indonesia. The method used in this paper is literature study (books, journals, encyclopedias, and dictionaries). The results of this study indicate that “religious moderation” has the opportunity to maintain the nobility of religion so that it remains relevant and significant for all ages. In conclusion, a significant and relevant religious vision and mission to bring beauty, peace, a sense of kinship and unity in social diversity becomes manifest in “religious moderation”. Therefore, the call for “religious moderation” is imperative, they are: religion must be lived and practiced for the liberation of humans from extreme attitudes and actions that risk dehumanizing. In that perspective, religion should not be used as an instrument to justify destructive actions. Instead, make religion a source of creative inspiration to continuously improve the quality of human life everywhere.

Keywords: *religious moderation, plurality, intolerance, radicalism, terrorism.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan di balik pentingnya “moderasi beragama” untuk mencegah radikalisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (buku, jurnal, ensiklopedia, dan kamus). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “moderasi beragama” berpeluang untuk menjaga keluhuran agama agar tetap relevan dan signifikan untuk segala jaman. Kesimpulannya, visi dan misi keagamaan yang signifikan dan relevan untuk menghadirkan keindahan, kedamaian, rasa kekeluargaan dan persatuan dalam keragaman sosial terwujud dalam “moderasi beragama”. Oleh karena itu, seruan kepada “moderasi beragama” menjadi keharusan, yaitu: agama harus dihayati dan diamankan demi pembebasan manusia dari sikap dan tindakan ekstrem yang berisiko dehumanisasi. Dalam perspektif itu, agama tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membenarkan tindakan destruktif. Sebaliknya, jadikan agama sebagai sumber inspirasi kreatif untuk terus meningkatkan kualitas taraf hidup manusia di manapun juga.

Kata Kunci: *moderasi beragama, pluralitas, intoleransi, radikalisme, terorisme.*

PENDAHULUAN

Radikalisme sesungguhnya bermakna netral, bisa positif dan bisa negatif. Dalam khasanah yang positif, misalnya, pemikiran radikal yang berupaya meneleak akar-akar masalah yang mengancam eksistensi masyarakat, lalu berdasarkan pemikiran tersebut berjiwaku mencari solusi atau menyusun strategi yang berimplikasi konstruktif bagi eksistensi semua pihak, jelas dibutuhkan. Sebaliknya radikalisme menjadi negatif, apa pun landasan ideologisnya, kalau berimplikasi destruktif dalam kenyataan. Dalam konteks pluralitas agama, seperti kata Charles Kimball, sikap “taat buta kepada pemimpin” (karena tidak berani atau tidak mampu berpikir kritis) berpotensi membuat agama menjadi sumber bencana (Kimball, 2003), misalnya, memicu konflik dan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik.

Dalam konteks pluralitas di Indonesia, radikalisme yang berciri intoleransi, fanatisme, dan eksklusivisme yang mengemuka dalam penolakan terhadap perbedaan menunjukkan bahwa “negeri yang berlandaskan pada Pancasila” ini tidak sedang baik-baik saja. Radikalisme berbahaya bukan hanya karena menunjukkan kegagalan berpikir kritis sebagai akibat menggunakan potensi akal budi semata-mata untuk pembenaran atas perilaku (Koten, 2018), tapi juga karena berpotensi “meredupkan pancaran keluhuran agama” sebagai sumber nilai tertinggi untuk menghormati segala macam bentuk ciptaan Tuhan. Karena itu, gejala kekerasan dalam praksis beragama dan penolakan terhadap pluralitas demi ambisi kepada keseragaman kerangka pemikiran, serta pemaksaan kehendak kepada yang lain merupakan tanda “gagal paham” yang paling nyata terhadap esensi agama dan Kemahakuasaan Tuhan.

Pluralitas agama di Indonesia sejatinya berpotensi menjadikan bangsa Indonesia sebagai mercusuar peradaban dunia karena memiliki “kekayaan sumber nilai luhur” yang lebih efektif untuk membangun komunitas berperadaban tinggi dengan memproyeksi sikap hormat kepada kemanusiaan sebagai inti praksis beragama secara berkebudayaan. Akan tetapi, sikap tertutup kepada yang lain dalam berbagai bentuk ekspresinya yang rentan destruktif dan kecenderungan penyeragaman yang menafikan keragaman dan ketaatan kepada pemimpin yang tanpa melibatkan pemikiran kritis justru membuat Indonesia berpotensi menjadi “ancaman bagi peradaban dunia”. Gejala menguatnya radikalisme akibat intoleransi atau terorisme yang mengatasnamakan agama menunjukkan rendahnya tingkat penalaran atau pemahaman kelompok radikal mengenai esensi agama dan makna agama untuk kehidupan manusia dalam praksis. Patut dicurigai bahwa indoktrinasi dogmatis yang dilakukan secara sistematis oleh beberapa “tokoh agama” yang menuntut “ketaatan buta” dari para pengikutnya atau demi keseragaman kerangka pemikiran teologis di kalangan mereka, merupakan awal dari kekeliruan dalam menalar dan menakar esensi dan makna agama.

Fakta menunjukkan bahwa ambisi atau nafsu kelompok tertentu kepada keseragaman identitas keagamaan dalam konteks pluralitas yang disertai dengan upaya indoktrinasi dogmatis dalam memperjuangkan implementasinya dalam praksis telah membuat agama menjadi rentan terhadap konflik dan kekerasan (Kimball, 2003). Indoktrinasi dogmatis demi keseragaman pola pikir dan kerangka teologis jelas memperlemah daya nalar dan kemampuan berpikir manusia secara kritis dan logis terhadap esensi dan peran agama dalam praksis. Konon intoleransi yang menjadi akar radikalisme dan terorisme sebagai klimaksnya disinyalir berkaitan dengan indoktrinasi dogmatis yang sistematis tersebut.

Kini Indonesia sedang menjadi sorotan global karena menguatnya gejala radikalisme di satu sisi, dan melemahnya daya “moderasi beragama” di sisi yang lain. Kondisi ini memang kurang menguntungkan bagi Indonesia yang dipandang berpotensi menjadi mercusuar peradaban dunia berbasis nilai-nilai religiusitas. Akibatnya, alih-alih menjadi inspirasi untuk membangun peradaban dunia yang berkualitas “*humanum religiosum*”, Indonesia justru dipandang membahayakan peradaban global lantaran menafikan pentingnya toleransi mendalam yang lebih efektif dan relevan untuk menghadirkan kedamaian. Karena itu, menguatnya gejala radikalisme di Indonesia merupakan seruan (peringatan keras) kepada semua umat beragama agar bertanggungjawab dalam praksis beragama. Dalam konteks itu, seruan, ajakan, dan undangan untuk memperkuat “moderasi beragama” di Indonesia merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mencegah agar agama tidak terjebak dalam narasi dan aksi antikemanusiaan.

Dalam artikel ini, peneliti akan mendeskripsikan empat hal yang terkait dengan “moderasi beragama”, yakni: *pertama*, mengenai perspektif agama. *Kedua*, mengenai intoleransi, radikalisme, dan terorisme. *Ketiga* mengenai apa itu “moderasi agama”. *Keempat*, mengenai mengapa “moderasi beragama” dipandang sebagai hal yang urgen di Indonesia. Uraian deskriptif untuk keempat hal di atas bertujuan untuk memahami esensi agama, dampak-dampak radikalisme dalam praksis sehingga mesti dicegah melalui praksis beragama yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan akal budi (masuk akal) dan signifikan untuk memahami esensi agama, serta tujuan agama secara vertikal (mengutuhkan relasi manusia dan Tuhannya) dan secara horisontal menghadirkan kedamaian dalam kenyataan atau menghormati sesama manusia, apa pun latarbelakang agamanya. Dalam arti itulah “moderasi beragama” menjadi penting dan perlu untuk pluralitas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni melalui studi kepustakaan (*liberary research*) mengenai urgensi moderasi beragama untuk mencegah radikalisme di Indonesia. Karena itu, proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan serta sumber-sumber lainnya yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dicatat, dipelajari, dikaji dan dianalisis. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*), yakni: pertama, data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; kedua, hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan; ketiga, data yang telah disistematisasikan itu selanjutnya dianalisis dan dijadikan landasan untuk merumuskan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari pemahaman umum menuju ke pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat lebih dipahami. Hasil penelitian studi literatur bermanfaat untuk membuat gambaran umum (generalisasi) dan memahami arti dari persoalan yang dikaji (Nazir, 2003, pp. 22-27).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rentang usia ‘agama’ dapat dipastikan seirama dengan rentang peradaban manusia. Persisnya, tidak ada peradaban manusia yang lepas dari pengaruh dinamika agama atau religi dalam arti yang luas. Dalam arti itu juga, agaknya dapat dipastikan bahwa setiap komunitas manusia di

dunia ini menaruh kepercayaan kepada suatu daya transendental tertentu, sesuatu yang dianggap sebagai ruh semesta kehidupan (*anima mundi*) dan agama-agama menyebutnya dengan istilah yang tidak sama, misalnya, 'Gusti, dewa', God, Deus, Theos, 'Tuhan', dll (Samho dkk, 2019, p. 331).

Di Indonesia terdapat beragam agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dulu telah menjadi sumber kekuatan kehidupan individu dan kelompok terkait dengan keselamatan kini dan kelak (akhirat). Singkatnya, agama menawarkan kebaikan secara horizontal dan vertikal (keutuhan diri dengan sesama dan Sang Pencipta). Namun, dalam praksisnya, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut rupanya tidak selalu baik-baik saja. Terdapat rentang yang sulit dijembatani antara *das sollen* (yang seharusnya ada) dengan *das sein* (yang ada, fakta). Karena itu, penting memiliki perspektif agama yang mencirikan esensi, makna, dan perannya yang mengutuhkannya komunitas dan mengantar manusia kepada keselamatan. Dalam pembahasan selanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan mengenai perspektif agama, intoleransi, radikalisme, dan terorisme, "moderasi agama", serta alasan urgensi "moderasi beragama" di Indonesia.

PERSPEKTIF AGAMA

Sesungguhnya, apakah yang kita maksudkan dengan agama? Pertanyaan ini jelas sulit untuk dijawab, juga bukan merupakan topik baru dalam ranah akademis (ilmu-ilmu sosial pada umumnya). Sebagai hal yang multi faset, arti atau makna agama (religi) cukup sulit dikemas dalam sebuah definisi tunggal dan final yang diharapkan berlaku sama untuk semua manusia, di manapun. Setiap definisi atas agama menyajikan sebuah pemahaman tertentu saja tentang esensi yang sama atau bersifat perspektif. Hal itu wajar mengingat di satu sisi setiap agama mengklaim dirinya bersumber dari Yang Ilahi, sementara di sisi lain setiap agama dapat dipastikan lahir di komunitas yang telah memiliki agama atau kepercayaan tertentu. Artinya, tidak ada satu agama pun yang lahir di suatu tempat yang tanpa agama atau kepercayaan kepada Yang Transendental. Mungkin itulah yang menyuntik dosis tinggi kepada kecenderungan klaim atas kebenaran agama, yang selanjutnya menjadi embrio bagi intoleransi.

Karena itu, pertanyaan di atas memang tidak mudah untuk dijawab secara tuntas. Setiap jawaban terhadap pertanyaan mengenai apakah agama selalu beresiko reduktif atau tidak utuh mengingat agama, baik sebagai institusi maupun ajaran, berkaitan dengan Daya Transendental yang di satu sisi dikonsepsikan atau dirumuskan dalam ajaran agama dan di sisi lain diakui oleh penganut agama sebagai Sosok yang Mahakuasa, melampaui konsep dan logika manusia. Artinya, baik secara etimologi maupun terminologi, arti dan makna agama sesungguhnya sulit dibatasi dalam konsep yang baku (yang terbatas) karena berurusan dengan Daya Transendental yang tak terbatas (*infinite*).

Secara **etimologi**, agama berasal dari Bahasa Sanskerta (<http://www.penaraka.com/2012/04/pengertian-agama.html>), dan yang merujuk kepada sistem kepercayaan Hinduisme dan Budhisme di India, yakni: "a" yang berarti "tidak" dan "gama" yang berarti "kacau". Berdasarkan asal katanya itu, arti kata agama secara leksikal adalah "tidak kacau". Dalam arti itu, agama mestinya memang menjadi sumber keselarasan, ketertiban di mana ada kedamaian dan kenyamanan dalam kenyataan yang tidak pernah seragam. Arti yang senada tampak dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008, p. 15), bahwa agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antarmanusia serta manusia dan lingkungannya.

Agama juga merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang dimaksudkan untuk menerjemahkan konsep *religi* yang merupakan padanan untuk kata *religio* (Latin). Kata *Religio* berarti perasaan, yang tersatukan dengan rasa takut dan ragu dalam menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan (kepercayaan kepada) dewa-dewi. Menurut Heuken (1991, p. 31) kata *religio* diturunkan dari tiga kata dalam Bahasa Latin, yakni: '*relegere*' (yang berarti memerhatikan dengan teliti), '*religare*' (yang berarti mengikat lagi), dan '*reeligere*' (yang berarti memilih lagi). Bertolak dari ketiga kata dalam bahasa Latin tersebut, penalaran atau interpretasi mengenai arti agama atau religi pun bervariasi meskipun senantiasa berangkat dari arti etimologinya, yakni: memerhatikan dengan teliti, mengikat lagi, dan memilih lagi.

Berdasarkan uraian di atas, dan bila agama kita maksudkan dengan religi, agama dapat diartikan ke dalam tiga perspektif, yakni: **Pertama**, religi memberikan pandangan mengenai kehidupan agar manusia dapat memerhatikan dengan teliti (memilah-milah dengan bijak) mana yang merupakan hak Tuhan dan mana yang menjadi hak manusia. Dalam pengertian itu, supaya terwujud keadilan, manusia beriman mesti menggunakan hak-haknya secara tepat dan menghargai hak-hak sesamanya sebagaimana ia menilai haknya. Selain itu, religi memberikan pengertian kepada manusia supaya tidak mengambil alih apa yang diyakininya sebagai hak Tuhan dengan mengatasnamakan-Nya. **Kedua**, religi senantiasa memberikan peluang kepada manusia untuk dapat mengikatkan/mengeratkan diri kepada Tuhan melalui doa, pertobatan, dan penyerahan diri secara total dalam sikap pasrah kepada-Nya. Artinya, kendati manusia berkali-kali jatuh ke dalam dosa dan kesalahan tapi Tuhan selalu memberikan peluang kepada manusia untuk mengikatkan diri kepadaNya. **Ketiga**, religi memungkinkan manusia untuk senantiasa memilih cara hidup atau jalan yang terbaik bagi kehidupannya sesuai dengan yang diwahyukan oleh Tuhan; memberi daya untuk manusia mengalahkan egoismenya agar ia dapat menjalankan hidup dengan benar, baik, elok, dan suci sesuai dengan ajaran agama yang dipercayainya. Dalam arti itu, agama merupakan ungkapan lahiriah dan konkret dari hubungan batin manusia dengan Allah dan merupakan jawaban batin manusia terhadap hubungan yang diprakarsai oleh Allah melalui wahyu-Nya (Heuken, 1991, p. 33).

Secara **terminologi**, agama merupakan konsep yang multi tafsir, dapat ditelisik dari berbagai perspektif keilmuan. Itulah salah satu alasan mengapa Mukti Ali mengatakan bahwa agama merupakan istilah yang sulit untuk didefinisikan secara tuntas (Ali, 1971, p. 4). Dalam perspektif Nye (2003, p. 2), misalnya, terminologi agama senantiasa merujuk kepada sesuatu yang manusia lakukan dan karena itu studi mengenai agama pada dasarnya berkaitan dengan manusia dan kebudayaan-kebudayaan. Pandangan Nye ini jelas mengaitkan agama dengan konteks masyarakat, khususnya kebudayaannya. Sebagai unsur kebudayaan, agama begitu dinamis dalam konteks dan ruang di mana ia berada. Karena itu, pandangan Mukti Ali di atas tampak relevan dengan pandangan Nye terutama dalam konteks keluasan makna agama yang berkaitan dengan dinamika peradaban manusia. Agama senantiasa mewarnai perkembangan peradaban manusia. Itulah sebabnya, meskipun sudah banyak pemikir yang berjibaku untuk mendefinisikan arti dan makna agama tapi belum ada teori atau defenisi mereka mengenai agama yang persis sama. Pada

umumnya, para pemikir memaknai agama secara terbuka sehingga defenisinya pun bukan merupakan kesimpulan final atau lebih merupakan pengakuan yang rendah hati bahwa agama merupakan lembaga atau institusi yang berkaitan dengan Daya Transendental yang tidak pernah tuntas untuk didiskusikan dan dikonseptualisasikan. Sebagai demikian, karya apa pun mengenai agama selalu bersifat belum selesai. Sebab agama senantiasa berkaitan dengan Sosok Yang Misteri sebagai esensinya. Perkaranya adalah bahwa Sosok Yang Misteri itu tidak identik dengan agama atau tidak harus “berdiam” dalam agama tertentu. Dalam konteks itu, agama sebetulnya bukanlah persoalan tapi hal atau tema yang dipersoalkan (ditafsirkan, dikritisi, dihayati dengan sikap rendah hati sebagai ungkapan ketidakberdayaan manusia dalam memahami esensinya secara tuntas). Karena itu, mempersoalkan atau mendiskusikan agama-agama dalam ranah ilmu-ilmu merupakan upaya konstruktif untuk menemukan signifikansi atau relevansinya bagi kehidupan manusia. Dalam arti yang terakhir itu, misalnya, tampak pada pengertian agama dalam Islam yang mengkristal dalam kata *Din*. Arti dan makna kata *Din* luas cakupannya berkaitan dengan kehidupan. Makna kata *Din* sebagai agama erat berkaitan dengan kehidupan yang tertib dan teratur (damai dan tenteram) karena di dalam *Din* terdapat tanggungjawab, aturan pemimpin yang mengatur serta individu-individu yang hidup dengan tertib dan damai di dalamnya. Sebagai suatu kristalisasi nilai-nilai, *Din* merupakan prinsip dasar atau asas kehidupan yang tertib dan teratur (yang menjamin adanya kedamaian dan ketenteraman) dalam suatu peradaban (Al-Attas, 1993, p. 53).

Berdasarkan pembahasan mengenai perspektif agama di atas, harus diakui bahwa penalaran ilmu-ilmu mengenai agama dapat benar dalam perspektif tertentu saja. Berikut ini merupakan tinjauan mengenai arti agama dalam perspektif beberapa ilmu.

Pertama, dalam ranah **fenomenologi**, seperti dipahami oleh Rudolf Otto, agama berkaitan dengan pengalaman mengenai aspek ‘yang *numinous*’ (yang inti sekaligus sama sekali lain) dalam agama. Pengalaman tentang yang *numinous* itu, kata Otto, meliputi aspek rasional, nonrasional, dan nonkonseptual. Aspek rasional mengandung arti bahwa rasio atau akal budi manusia dapat menarik makna logis dari pengalaman beragama atau tidak melihatnya bertentangan dengan rasio. Aspek nonrasional mengandung arti bahwa makna pengalaman beragama di satu sisi melampaui rasio tapi di sisi lain dapat dijangkau atau dipahami oleh rasio dalam batas-batas tertentu. Aspek nonkonseptual mengandung arti bahwa makna pengalaman beragama itu tidak dapat diangkum secara utuh dalam rumusan konseptual atau pemahaman manusia. Berangkat dari aspek-aspek pengalaman beragama itu, Otto kemudian menyimpulkan bahwa pengalaman beragama adalah pengalaman yang bercorak *misterium, tremendum et fascinans* (dalam Eliade, 1987, p. 323). Jadi, pengalaman beragama itu misteri, menggentarkan, menakutkan, dan sekaligus memesona. Sisi misteri Tuhan itu membawa kemungkinan bahwa semua agama dapat berpeluang benar tentang-Nya. Dalam arti itu, pandangan mengenai kebenaran agama tidak harus dilihat sedemikian ketat hitam-putih (Samho, dkk. 2019, pp. 94-95). Sementara Eliade (1987, p. 323) yang terkenal dengan konsepnya mengenai alam sebagai “jejak Yang Ilahi” memandang pengalaman religius sebagai pengalaman akan “Yang Kudus”, “Sosok Maha Suci” yang bersifat *kratofani* (pewahyuan), *hierofani* (penampakan yang sakral), dan *teofani* (penampakan Tuhan dalam bentuk yang kelihatan). Pengalaman akan Yang Sakral itu menurut Eliade merupakan pengalaman tentang “Yang Maha Lain”, yang serentak memengaruhi seluruh kehidupan manusia (Saliba, 1976, p. 63). Jadi, apa yang disebut pengalaman religius itu sangatlah luas cakupannya, menyangkut seluruh peristiwa hidup konkret yang dialami oleh manusia dalam

keluasan rentang kehidupan dan interaksinya dengan jagat raya. Barangkali itulah alasan di balik perkataan Rudolf Otto bahwa “yang datang pertama adalah pengalaman religius, biarpun belum dapat disebut iman” (Eliade, 1987, pp. 211-212).

Kedua, dalam ranah **psikologi**, menurut William James, semua agama lahir dari lapisan indera keenam. Agama-agama, katanya, merupakan hasil persepsi intuitif mengenai realitas Ilahi yang menjiwai kompleksitas kenyataan di jagat raya ini. Letak indera keenam yang meresapi daya-daya Ilahi itu berada dalam ranah mental, spiritual atau batin manusia yang memuat potensi imajinasi ontologis, bersifat nonrasional, dan beririsan dengan lapisan alam bawah sadar manusia (James, 1958, p. 61). Sementara Maslow (2000) meyakini bahwa realitas pengalaman tentang Yang Ilahi itu rupanya memang tak pernah sungguh-sungguh bisa diungkapkan secara tuntas dan definitif, kendati bisa dialami dan dirasakan kehadiran-Nya dalam pelbagai cara. Itulah sisi paradoks Yang Ilahi. Barangkali kenyataan itu jugalah yang membuat Maslow menyebut pengalaman religius sebagai *Peak Experience* (Maslow, 2000, p. 85). Ungkapan Maslow itu menunjukkan bahwa di balik agama itu ada kekuatan yang menjadi awal, akhir, dan orientasi final kehidupan manusia, yang meskipun esensinya dapat disadari, dirasakan, dan dialami, tapi tidak mungkin tuntas untuk dinarasikan secara verbal.

Ketiga, dalam ilmu **antropologi**, Durkheim membeberkan bahwa sistem representasi pertama yang diciptakan oleh manusia untuk menggambarkan dunia dan dirinya ternyata berasal dari yang religius. Ia kemudian menegaskan bahwa tidak ada agama yang bukan kosmologi dan spekulasi tentang Tuhan. Gagasan tentang Tuhan merupakan karakter utama dari setiap hal yang bersifat religius. Karena itu, secara mendasar tidak ada agama yang salah. Semua agama benar sesuai dengan gaya dan bentuknya masing-masing (Durkheim, 1995, pp. 2-9). Dalam konteks itu, Durkheim melirik peran ritus-ritus dan simbol-simbol dalam agama-agama yang menurutnya merupakan sarana untuk mendeskripsikan Tuhan dalam rangka memahami esensi-Nya dan memenuhi kebutuhan spiritual manusia yang meyakini-Nya. Karena itu, bagi Durkheim, setiap gambaran Tuhan yang termuat dalam ritus-ritus dan simbol-simbol, adalah ‘benar’ belaka bagi yang mempercayai-Nya. Manakala komunitas yang meyakini-Nya berbudaya patriarkal maka deskripsi mengenai Tuhan menampilkan karakter yang maskulin, demikian juga sebaliknya (Knitter, 1985, p. 69). Di sini tampak bahwa gagasan Durkheim tentang Tuhan itu cair (dinamis) sehingga dapat ditampung sesuai dengan bermacam bentuk wadah, yakni budaya komunitas religius masing-masing. Sebab, ketika kita meyakini bahwa Dia adalah Mahakuasa maka pada saat yang sama kita mengakui bahwa Dia tidak mungkin dibatasi oleh cara berpikir dan berkeyakinan dari kelompok tertentu saja. Iman kepada kemahakuasaan Tuhan sejatinya juga iman yang mencakup keyakinan kita mengenai keluasan-Nya yang dapat diakses, dialami, dan dipercayai oleh setiap manusia dari ranah dan dengan cara yang tidak harus sama, yang kita sebut ‘agama’ itu. Pandangan Durkheim ini -terlepas dari kontroversinya- rasanya masih penting untuk mengingatkan kita kembali, bahwa sebagaimana segala jenis mahluk hidup sama-sama hidup, segala jenis agama pun bisa saja dilihat sebagai secara substantif sama-sama ‘religius’, sehingga sebenarnya tak ada alasan mendasar untuk merendahkan satu sama lain. Namun, pandangan Durkheim tentang agama bukan tanpa kelemahan mendasar, terutama terkait dengan fungsi simbolik agama yang dideskripsinya sebagai demi mengukuhkan dan menegaskan kembali solidaritas kelompok. Penekanan pada aspek simbolik pada agama membuat Durkheim jatuh pada sifat reduksionis. Unsur moral dan religius pada agama direduksinya kepada “yang sosial”. Dalam tekanan yang terakhir itu, Durkheim kemudian melihat pengaruh kultur turut

menentukan dan membatasi simbol-simbol religius, yang pemahaman akan makna-maknanya membutuhkan penyelidikan secara ilmiah. Terlepas dari kelemahan yang ada pada teorinya, Durkhem telah memberi salah satu landasan teoretis mengenai sains tentang agama. Bertolak dari gagasan Durkheim, kita juga dapat menggarisbawahi bahwa eksistensi Tuhan sebagai Daya Transendental tidak mungkin “dipenjara” dalam agama. Pandangan bahwa Tuhan itu Mahakuasa mengandung arti mendasar bahwa Ia menembus batas-batas kelembagaan religius. Karena itu, “klaim kebenaran agama” dengan menyangkal kebenaran agama yang lain tidak dapat dibenarkan baik di hadapan pandangan Durkheim, maupun di hadapan keyakinan bahwa Tuhan itu Mahakuasa, misteri, dan di luar batas-batas kategori rasionalitas manusia. Kemutlakan kebenaran itu hanya ada pada Tuhan, bukan pada agama tertentu. Sementara itu, antropolog macam Geertz (1973) memusatkan perhatiannya pada sisi simbolik dalam religi. Peran religi atau agama, kata Geertz, adalah mendeskripsikan pengalaman mistik yang memesona, yang mencakup makna eksistensial dan misteri kehidupan manusia (mengenai kehidupan dan kematian, masa kini dan masa yang akan datang), yang memang tidak mudah diutarakan secara verbal sehingga manusia terdorong untuk mengungkapkannya dalam sistem simbol-simbol (Geertz, 1973). Karena itu, manusia beragama pun memandang, menginterpretasi, dan memahami agama sebagai sistem simbol-simbol, yang dimaknainya sebagai sarana untuk mempererat relasi antara manusia dengan sosok yang disimbolkan, yakni Roh Tertinggi dan juga relasi manusia dengan sesama umat beragama. Simbol-simbol dalam agama, kata Geertz, menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, merasuki diri penganutnya sehingga terpatrit dalam kesadarannya dan mendorongnya untuk melakukan suatu aktivitas religius (tindakan-tindakan ritual) lantaran mendapat pengaruh dorongan spiritual yang sulit dideskripsikan dan sulit dikendalikannya (Geertz, 1973).

Keempat, dari ranah **Sosiologi**, kita temukan benang merah antara apa yang dikatakan oleh Maslow di atas dengan pandangan sosiolog macam Joachim Wach. Bagi Wach (1994, p.44), pengalaman religius merupakan tanggapan manusia terhadap “realitas mutlak” atau realitas yang menyatukan dan menentukan keseluruhan semesta. Wach (dalam Hendropuspito, 1983, p. 35) kemudian berupaya memerinci agama ke dalam tiga unsur, yakni teoretis, praktis, dan sosiologis. Dari unsur teoretisnya, agama adalah suatu sistem kepercayaan. Dari unsur praktisnya, agama berupa sistem kaidah yang mengikat penganutnya. Dari unsur sosiologisnya, agama mempunyai sistem perhubungan dan interaksi sosial. Berangkat dari pemilahan unsur-unsur agama itu, Wach menegaskan bahwa jika salah satu unsur agama itu tidak ada, orang tidak dapat berbicara tentang agama, tapi itu hanya kecenderungan religius. Dalam arti itu, agama yang sesungguhnya adalah yang terdiri dari ajaran, implementasi dalam praksis yang berdampak positif pada interaksi sosial. Pandangan Wach itu tampak berkorelasi dengan penegasan dari Nikolas Luhmann (dalam Hendropuspito, 1983, p. 35) yang menekankan agama pada aspek fungsionalnya. Dalam perspektif itu, Luhmann kemudian melihat (arti) agama terutama sebagai suatu cara dengan mana suatu fungsi khas dimainkan dalam situasi evolusioner yang berubah terus-menerus. Sementara sosiolog macam O’Dea (1983) menelisik agama sebagai sistem sosial. Dari situ ia memberi penegasan bahwa agama dibuat oleh penganut-penganutnya dengan berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris, yang mereka percayai dan dayagunakan untuk mencapai keselamatan (individu dan masyarakat). Karena itu, O’Dea memaknai fungsi agama dalam perspektif vertikal, yakni sebagai manipulasi atas Daya nonempiris atau cara-cara supra empiris demi tujuan non-empiris atau supra empiris (O’Dea, 1983). Dalam perspektif yang berbeda,

sosiolog macam Dunlop (1946, p.9) melihat peran religi dalam konteks horizontalnya, yakni sebagai institusi atau bentuk kebudayaan yang menjalankan fungsi pengabdian kepada umat manusia manakala tidak tersedia suatu institusi lain atau manakala penanganan pengabdian tidak dipersiapkan dengan cukup oleh institusi yang lain. Selain itu, pandangan yang patut dipertimbangkan juga relevansinya adalah dari J Milton Yinger (dalam Hendropuspito, 1983, p. 35) yang melihat agama sebagai sistem kepercayaan dengan mana suatu masyarakat atau kelompok manusia berjaga-jaga menghadapi masalah terakhir hidup ini. Yinger agaknya mengingatkan kita akan peran penting agama untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar mengenai tujuan hidup di dunia ini.

Kelima, dalam ranah **teologi**, agama dimaknai dalam perspektif iman kepada Tuhan berdasarkan Kitab Suci dan dogma. Bagi Küng, misalnya, agama adalah kunci utama bagi manusia untuk memahami secara utuh mengenai keluasan dan ketidakberhinggaan dimensi kehidupannya, baik secara vertikal maupun secara horizontal (Küng, 1986). Karena itu, Küng menegaskan bahwa religi merupakan “suatu pandangan penuh iman mengenai kehidupan, pendekatan kehidupan, jalan kehidupan” (Küng, 1986, p. xvi). Sebagai demikian, religi mencakup semua dimensi kehidupan manusia atau merupakan suatu pola fundamental yang melingkupi individual dan masyarakat, manusia dan dunia, yang melaluinya seseorang memerhatikan dan mengalami, berpikir dan merasakan, bertindak dan menderita, segalanya. Apa yang digarisbawahi oleh Küng itu menyadarkan manusia bahwa agama sejatinya memiliki fungsi yang vital dan holistik bagi kehidupannya, baik secara vertikal maupun secara horisontal.

Penalaran terhadap agama atau religi di atas, baik secara etimologi, terminologi, maupun dalam perspektif ilmu-ilmu menunjukkan bahwa (secara implisit dan secara eksplisit) tidak ada agama yang lahir di ruang hampa. Agama-agama besar yang acap kali disebut agama-agama dunia, yang eksis sampai saat ini, merupakan produk konfrontatif dari keberagaman konteks sosial yang ditandai oleh pluralitas. Artinya, setiap agama atau kepercayaan kepada Yang Ilahi selalu lahir dalam konteks pluralitas. Itulah sebabnya, setiap agama memiliki kecenderungan kuat kepada klaim kebenaran secara sepihak, yang merupakan awal dari sikap intoleran kepada yang lain dan merupakan akar dari radikalisme yang bermuara kepada terorisme. Uraian selanjutnya akan membahas secara sekilas mengenai ketiga hal tersebut.

INTOLERANSI SEBAGAI AKAR RADIKALISME

Pluralitas agama di Indonesia membutuhkan sikap toleransi dari semua pihak agar komunitas yang majemuk senantiasa dapat saling menghormati sehingga terwujud kondisi hidup bersama yang damai dan tenteram. Secara historis, seruan mengenai pentingnya toleransi di Indonesia secara eksplisit tampak dalam pernyataan Sukarno sebagai berikut:

“Bukan saja bangsa Indonesia yang ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menyembah Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima

daripada Negara kita adalah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain" (Soekarno, 1964, pp. 29-30).

Inti pandangan Sukarno di atas, yang kemudian mengkristal dalam sila pertama Pancasila, adalah bahwa bangsa dan negara Indonesia mesti ber-Tuhan secara berkebudayaan, leluasa (tanpa paksaan), berlandaskan prinsip saling hormat-menghormati hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Karena itu, segala bentuk pemaksaan atau intoleransi dalam kehidupan antarumat beragama, kasar atau halus, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dikristalisasikan sebagai Pancasila.

Akan tetapi, praksis agama agama di Indonesia menghadapi tantangan serius berkaitan dengan gejala intoleransi dari kelompok Islam radikal yang akhir-akhir ini cenderung menguat. Secara historis, radikalisme di Indonesia, juga di seluruh dunia, disinyalir berawal dari pemikiran-pemikiran ideologi Hassan al-Banna, Maududi dan Sayid Qutb (Daven, 2018, pp. 32-33), yang pemikirannya pada dasarnya berupaya memperjuangkan moralisasi politik berdasarkan hukum Islam.

Kelompok radikal sebelum kemerdekaan, misalnya, termotivasi oleh pandangan Maududi dan Sayid Qutb untuk memberontak mengusir penjajah dan menentang atau menolak ideologi komunis. Di masa kemerdekaan, mereka menolak sistem pemerintahan yang dipandang sangat sekuler, yakni Pemerintahan Sukarno (Orde Lama) dan pemerintahan Suharto (Orde Baru). Penolakan terhadap sistem pemerintahan yang dipandang terlampau sekuler itu mengemuka dalam gerakan radikal yang menjurus kepada keinginan kuat untuk mendirikan negara Islam berdasarkan syariat seperti Gerakan DI/TII di bawah komando Kartosoerijo yang selanjutnya menginspirasi Kahar Muzakar dan Daud Beureuh di Aceh. Meskipun gerakan kelompok radikal ini secara politik berhasil digagalkan oleh pemerintahan Sukarno, tapi yang sulit disangkal adalah bahwa gerakan Darul Islam di bawah kepemimpinan Kartosoerijo ini telah menginspirasi para pejuang Muslim radikal di Indonesia untuk terus memperjuangkan berdirinya Negara Islam berdasarkan syariat. Konon organisasi Islam seperti *Jemaah Islamiah* memiliki kecerdasan/kemiripan ideologis dengan aksi kelompok *Darul Islam* yang dikomandoi oleh Kartosoerijo (Daven, 2018, p. 34). Radikalisme di Indonesia yang cenderung menguat akhir-akhir ini agaknya tidak mungkin dilihat secara terlepas dari akar historisnya. Aksi kelompok radikal dalam bentuk peledakan bom atau terorisme yang mengemuka di Indonesia sejak tahun 2000 (Mahfudh & Asril Putra, 2010, pp. 15-20) bisa jadi memiliki kemiripan tujuan dengan aksi radikalisme pada jaman penjajahan dan pada awal kemerdekaan. Artinya, bisa jadi berakar dalam gerakan radikalisme awal tadi.

Radikalisme yang mengemuka dalam terorisme atas nama agama merupakan tanda nyata bahwa intoleransi perlu dicegah sejak dini karena mengancam eksistensi keragaman atau pluralitas di Indonesia. Dalam konteks pluralitas agama di Indonesia, gejala radikalisme akibat intoleransi relatif rentan terjadi sampai saat ini. Barangkali itulah sebabnya mengapa perbincangan seputar intoleransi atau toleransi (arti dan maknanya), meski bukan merupakan topik baru, tetap relevan dan signifikan. Namun, apakah yang kita maksudkan dengan istilah intoleransi? Uraian berikut akan menampilkan perspektif etimologis dan terminologis terkait dengan toleransi, yang diharapkan dapat memberi *insight* mengenai apa arti dan makna intoleransi.

Secara **etimologis**, toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerare* (Bagus, 1996, p. 1111; Riyanto, 2010, p. 400). Arti pertama "*tolerare*" adalah tahan, bersabar, memikul beban atau sesuatu yang terasa membebani (dapat merupakan beban fisik, psikis, mental, atau gangguan lingkungan). Karena itu, sikap toleran berarti bersedia tahan, bersabar dalam memikul beban gangguan yang timbul dari cara hidup orang lain yang berbeda dengan cara hidup atau pandangan hidup diri sendiri. Dalam Bahasa Inggris, kata toleransi yang berakar dalam Bahasa Latin, "*tolerare*" itu diterjemahkan dengan kata *tolerance*.

Secara **terminologis** (peristilahan), kata *tolerance* dimaknai sebagai "*the attitude of someone who is willing to accept other people's beliefs, way of life, etc., without criticizing them even they disagree with them. The ability to experience something unpleasant or painful without being harmed*" (Rundell, 2002, p. 1513). Jadi, secara terminologi, istilah toleransi merupakan sikap seseorang yang mau menerima kepercayaan, cara hidup orang lain, dan lain-lain, tanpa mengkritik mereka meskipun bahkan tidak setuju dengannya. Kemampuan untuk mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan tanpa disakiti.

Berdasarkan uraian mengenai arti etimologi dan terminologi toleransi di atas, toleransi merupakan sikap individu (atribut individu) yang berkaitan dengan kecerdasan dan sikap sosial seseorang dalam konteks pluralitas agama. Toleransi merupakan sikap menerima bahwa dalam fakta sosial terdapat perbedaan keyakinan-keyakinan dan pandangan hidup dengan yang diyakini sendiri tanpa mengkritiknya kendati tidak menyetujuinya (meyakininya), dan bahkan mau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan tanpa merusaknya. Dalam perspektif itu, istilah toleransi dapat dimaknai juga sebagai pengekangan diri yang disengaja dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai, ditolak, ditemukan mengancam (Vogt, 1997, p. 3) atau kesediaan untuk menanggung beban, memikul sesuatu yang dirasakan dan disadari sebagai hal yang mesti ditanggung demi kebersamaan, bisa dalam arti fisik, psikis, mental, dan ekologis. (Riyanto, 2010).

Jadi, bersikap toleran terhadap sesama yang berbeda cara dan pilihan pedoman hidupnya bukan berarti hanya sebatas membiarkan orang lain berkembang dan nyaman dalam pilihannya yang berbeda itu, tapi juga mau berpartisipasi aktif dalam mendukungnya untuk berkembang dalam pilihannya (sehingga semakin berkualitas) tanpa disertai dengan keharusan untuk menyetujui atau mengamini pilihannya tersebut. Toleransi mestilah didorong oleh intensi baik yang dingkapkan secara aktif dan proaktif dalam tindakan yang menopang, menyangga, memikul, dan mengangkat beban hidup sesama atau bersama sebagai konsekuensi dari perjumpaan antara cara-cara dan pilihan-pilihan hidup yang berbeda-beda dalam komunitas sehingga terwujud kondisi hidup bersama yang aman, nyaman, dan ringan (Go, 1982).

Sebagai sikap individu yang menandai kecerdasan dan kedewasaan sikap sosial, toleransi jelas bukan nilai bawaan sejak lahir atau bukan merupakan sifat yang otomatis ada pada manusia (Rapp & Freitag, 2015, p. 1046). Toleransi terbentuk dalam interaksi sosial dan karena itu harus dipelajari dan dikonstruksi melalui proses sosial juga. Interaksi sosial dalam keberagaman pada umumnya merangsang pertumbuhan toleransi, membuka orang kepada gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan yang penuh makna untuk kebersamaan dalam masyarakat yang heterogen. Tanpa sikap toleransi, keberagaman dalam kehidupan sosial dapat dipastikan terganggu atau sulit mencapai kedamaian.

Dalam nuansa yang luas, menurut Janmaat dan Keating (2019, p. 46), terminologi toleransi mengacu kepada penerimaan yang diungkapkan dengan bersikap baik dan inklusif terhadap berbagai kelompok minoritas yang acap kali dimarginalisasikan atau didiskriminasikan oleh kelompok mayoritas. Sebagai demikian, toleransi adalah lawan dari permusuhan, prasangka buruk, intimidasi, dan eksklusi. Dalam arti itu, toleransi dapat dimaknai juga sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri (untuk tidak memaksakan kehendak sendiri) ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak disukainya.

Dalam konteks pluralisme agama, “toleransi memacu kerjasama dan saling pengertian di antara umat beragama” (Riyanto, 2010, p. 401). Artinya, toleransi itu harus aktif, bukan sebatas dalam sikap netral. Implementasi toleransi aktif tentu tidak sebatas menyampaikan ucapan selamat kepada pemeluk agama lain yang merayakan hari besar keagamaannya, tapi juga mendukung umat lain untuk maju dalam praksis beragama, membantu umat lain dalam mengadakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkannya untuk menunaikan ibadah dan ajaran keagamaannya (bergotong royong dalam mendirikan rumah ibadah, berkerjasama dalam mengatasi masalah masalah sosial, ekologi, dan kesehatan masyarakat, dll).

Jadi, bila ditelisik dari arti etimologi dan terminologi toleransi di atas, betul bahwa intoleransi (baik dalam bentuk sikap maupun tindakan) kepada yang lain berpotensi melahirkan radikalisme yang kemudian memuncak kepada terorisme sebagai klimaksnya. Namun, apakah yang kita maksudkan dengan radikalisme dan terorisme?

Pertama, **radikalisme**. Secara etimologi, radikalisme berasal dari kata ‘*radix*’ dalam bahasa Latin yang berarti akar (Daven, 2018, p. 30). Sementara secara terminologi, radikalisme pada umumnya lebih dikaitkan dengan wacana (paham) dan aksi demi perubahan total dalam praksis sosial dan politik (Koten, 2018). Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis itu, sebagai suatu istilah, radikalisme sesungguhnya bermakna netral. Artinya, belum tentu negatif atau positif.

Sebagai kerangka pemikiran atau paham dan ajaran (tentang suatu aspek kehidupan), seorang dipandang bersikap radikal kalau berdasarkan paham-paham yang diyakininya ia berupaya memperjuangkan perubahan total pada tatanan sosial dan politik selaras dengan pandangan hidup yang diikutinya. Pengertian radikalisme ini juga tampak positif. Artinya, ia belumlah dapat dikategorikan sebagai paham atau ajaran yang pasti negatif. Dalam ranah filsafat, misalnya, pemikiran radikal seseorang terhadap kenyataan atau realitas justru dipandang perlu sebab menunjukkan sikap kritisnya terhadap persoalan tertentu. Sementara dalam arti yang luas, pemikiran radikal yang ditujukan untuk membebaskan manusia dari penindasan dan kekejaman dari pihak yang lain, tidak bisa dipandang sebagai sikap radikal yang negatif. Artinya, radikalisme tidak mesti selalu dinilai sebagai kerangka pemikiran yang negatif. Karena itu, apakah radikalisme itu positif atau negatif sesungguhnya dapat dinilai dari dampak yang ditimbulkannya. Sejauh dimaksudkan sebagai penolakan terhadap kondisi ketidakadilan dan perendahan martabat kehidupan manusia akibat politik sekuler dan demi memperjuangkan perwujudan kondisi humanistik yang adil dan beradab serta tidak destruktif, wacana dan aksi radikalisme tidak selalu negatif (Ro’uf, 2007). Dengan kata lain, radikalisme menjadi negatif ketika dimaksudkan untuk pemaksaan kehendak dari pihak atau golongan tertentu (mayoritas), baik secara halus maupun kasar (teror), kepada pihak atau golongan lain (Dejaeghere, dkk., 2012).

Radikalisme model itu senantiasa bercorak pemaksaan kehendak, kekerasan, dan teror kepada yang lain sehingga bermakna negatif dan perlu dicegah (Zulfadli, 2017).

Meskipun demikian, perspektif mengenai radikalisme cukup beragam. Istilah radikalisme seperti ditegaskan oleh Munip (2012), bisa dikategorikan ke dalam dua bentuk, yakni pemikiran/wacana dan aksi/tindakan. Sebagai wacana, pemahaman, dan ide yang sedang bergulir didialogkan, radikalisme berpotensi mengafirmasi jalan kekerasan untuk mewujudkan tujuan. Sementara sebagai aksi atau tindakan, radikalisme dapat berkaitan dengan aspek sosial-politik dan agama. Pada aspek politik, aksi radikalisme mengemuka dalam tindakan pemaksaan keinginan sehingga inkonstitusional, dan berpotensi melahirkan konflik sosial sebab tidak segan-segan menggerakkan massa demi memperoleh dukungan dalam mewujudkan aspirasi politik yang dipandangnyanya selaras dengan ideologi yang diperjuangkannya (Munip, 2012).

Sebagai suatu wacana dan aksi, seperti dikemukakan oleh Naim (2017), radikalisme dapat mengemuka dalam tiga ciri khas, yakni: *Pertama*, merupakan tanggapan terhadap dinamika kehidupan yang tengah berlangsung, yang dipandangnyanya tidak sesuai dengan ide, asumsi, lembaga, atau nilai-nilai kehidupan yang diidealkannya. Pada umumnya, tanggapan kaum radikal tersebut berupa evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan kepada masalah yang dipandang berseberangan dengan prinsip-prinsip yang dianutnya, yang didasarkan pada pemahaman agama yang diradikalisasi. *Kedua*, bahwa kelompok radikal tidak hanya berhenti pada penolakan, tapi berlanjut kepada aksi perjuangan secara radikal dengan berbagai upaya secara kontinyu demi mengubah tatanan yang dipandang mesti diganti dengan tatanan baru sesuai dengan pandangan Islam radikal yang menjadi ruh program aksi yang mereka perjuangkan. *Ketiga*, bahwa kelompok radikal amat yakin kepada ideologi yang mereka hayati dan perjuangkan sebagai yang paling benar, sementara ideologi yang lain dipandang salah. Karena itu, mereka melakukan pelbagai cara untuk mewujudkan yang selaras dengan ideologinya, termasuk dengan menggunakan cara-cara kekerasan (Naim, 2017).

Konon salah satu faktor yang disinyalir berkaitan dengan menguatnya gejala radikalisme di Indonesia adalah pendidikan agama karena ada materinya memuat konten radikalisme (Rokhmad, 2012; Lubis, 2021, p.19). Bila materi pembelajaran agama memuat konten radikalisme maka pendidikan agama turut memberikan basis ideologis untuk aksi radikal atau bahkan terorisme. Aksi terorisme merupakan bentuk aktualisasi keyakinan dimensi ideologis yang berkorelasi dengan isu fanatisme keagamaan dengan indikator radikalisme dan fundamentalisme. Salah satu tujuannya adalah melawan “kolonialisasi dan hegemoni barat” dan “keinginan mendirikan sistem negara Islam” (Ilyasin, dkk, 2017, p. 71). Terkait dengan apa yang diyakininya, kelompok radikal cenderung mengklaim kebenaran agama sebagai milik kelompoknya semata dan berupaya menyosialisasikannya dengan agresif, memaksa pihak lain untuk memercayai dan menerima keyakinan yang diusungnya. Kecuali itu, mereka juga acap kali memurtadkan pihak lain yang tidak mengikuti sistem kepercayaan yang mereka anut dan yakini.

Karena itu, pandangan Charles Kimball mengenai lima tanda yang memicu radikalisme agama tampak relevan, yakni klaim kebenaran mutlak, kepatuhan buta (kepada pemimpin), merindukan zaman ‘ideal’, tujuan menghalalkan segala cara, dan menyerukan perang suci (Kimball, 2003, pp. 84-234). Mengapa agama rentan memicu ketegangan atau kekerasan dalam praksis pluralitas? Agaknya pandangan Karen Armstrong (2002, p. 193) signifikan untuk dijadikan rujukan “jawaban”, yakni “rata-rata agama menyimpan kecenderungan radikal atau fundamentalis

dengan klaim kebenaran agama secara sepihak”, dan itu jelas memicu ketegangan sehingga bercorak negatif.

Meskipun radikalisme memiliki kemiripan arti dan makna, tapi aksi-aksi radikal pada umumnya tidak selalu memiliki kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing gerakan radikal yang dilakukan oleh kelompok radikal memiliki agenda dan tuntutan tersendiri. Artinya, kelompok radikal memiliki visi dan misi yang berbeda-beda sehingga ciri-cirinya pun beragam, sesuai dengan ideologi yang diperjuangkannya. Dalam konteks Indonesia, ciri-ciri kelompok radikal atau orang yang terpapar radikalisme, kata Komjen Pol Suhardi Alius selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah sikap intoleran, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan penyebaran paham kafiri (<https://20.detik.com/detikflash/20191105-191105003/bnpt-jelaskan-ciri-ciri-orang-yang-terpapar-radikalisme>).

TERORISME SEBAGAI KLIMAKS RADIKALISME?

Radikalisme acapkali ditautkan dengan terorisme atau dipandang sebagai alasan utama bagi terorisme. Radikalisme yang revolutif mengemuka dalam sikap dan tindakan yang menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan. Artinya, bercorak revolusioner. Dalam aksinya, kaum radikal ditandai oleh satu tujuan dengan mengecualikan perbedaan pandangan. Di sini yang menonjol adalah konformitas, keseragaman, dan peniadaan keunikan individu. Semuanya bertindak atas nama satu keluarga, kesamaan pandangan, satu tujuan serta semuanya berada dalam satu kolektivitas (Arendt, 1958, p. 58). Corak revolusioner ini mengemuka dalam wacana dan aksi terorisme. Namun, apakah yang kita maksudkan dengan istilah terorisme?

Sebagai suatu peristilahan, akar terorisme bisa dikaitkan dengan pelbagai aspek kehidupan, misalnya, politik, sosial, ekonomi, agama, dll. Artinya, belum ada pembatasan defenitif yang diterima secara universal bahwa makna istilah tersebut hanya terkait dengan salah satu aspek kehidupan saja, misalnya agama. Sebagai demikian, istilah terorisme dapat dialamatkan atau disematkan kepada semua tindakan orang yang dengan sengaja menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan ancaman kekerasan atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan tanpa pemilahan (Ilyasin, dkk., 2017, pp. 37-45), apa pun motivasi dan ideologi yang diikutinya.

Terorisme memiliki beberapa arti: *pertama*, “menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror” (DEPDIKNAS, 2008, p. 1455); *kedua*, “hal tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan, antara lain, dalam bidang politik” (Partanto & Dahlan, 1994, p. 748); *ketiga*, kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target-target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok sempalan atau agen-agen bawah tanah, biasanya untuk memengaruhi khalayak; *keempat*, merupakan tindakan simbolik yang dirancang untuk memengaruhi perilaku politik dengan cara-cara yang ekstra normal, termasuk dengan menggunakan ancaman dan pemaksaan; *kelima*, merupakan upaya menempuh cara-cara kekerasan untuk suatu target-target politis, dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Metode kekerasan digunakan sebagai ungkapan kemarahan atau penentangan secara politis terhadap pemerintah resmi karena negara tidak memenuhi tuntutan mereka (Salenda, 2009).

Namun, istilah terorisme yang mengemuka akhir-akhir ini lebih dikaitkan dengan agama, yang biasanya menyangkut perilaku kelompok radikal yang menimbulkan suasana ketakutan dan

keputusan atau aksi kekerasan yang membonceng agama tertentu untuk melegitimasi pemikiran dan aksinya demi mendapat dukungan dari simpatisan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan (politis) tertentu. Tragedi pada tanggal 11 September 2001 yang disinyalir dilakukan oleh sekelompok orang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan agama Islam merupakan aksi terorisme yang amat memilukan dan melukai perasaan kemanusiaan dalam skala global. Peristiwa tragis dehumanistik tersebut berhasil menciutkan nyali kaum beragama pada umumnya, dan sekaligus menyadarkan banyak pihak bahwa praksis keagamaan yang tanpa disertai dengan nalar kritis dapat menyerupai nasionalisme yang totaliter (Arendt, 1951). Sesungguhnya, praksis keagamaan yang intoleran juga mencerminkan kegagalan berpikir kritis dan rasional, terlebih ketika muaranya adalah aksi terorisme (Koten, 2018).

Aksi terorisme dan tindakan kekerasan atas nama agama oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab dapat menimpa semua agama. Artinya, semua agama sebagai lembaga manusia bisa rentan diselewengkan dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan pragmatis, sekuler, dan politik yang menguntungkan pihaknya sehingga mengaburkan esensi agama yang diboncengnya dalam aksi tersebut. Akibatnya, fakta pluralitas agama dicurigai atau dipandang sebagai sumber persoalan, rentan terhadap konflik dan kekerasan. Kehidupan beragama dan interaksi antarumat beragama pun serba hati-hati, kalau tidak mau dikatakan ditandai oleh sikap saling curiga dan prasangka negatif. Terkait dengan hal itu, Charles Kimball mengingatkan bahwa “setelah 11 September 2001, kita harus mendidik diri kita tentang sikap dan perilaku religius mana yang mengarah pada penderitaan berkepanjangan” (Kimball, 2003, p. 81). Kimball memang tidak secara eksplisit menyebut sikap dan perilaku toleran, tetapi pernyataannya itu jelas mendukung pentingnya toleransi. Dalam konteks itu, “moderasi beragama” merupakan salah satu strategi untuk menciptakan toleransi. Tanpa toleransi, sulit kita membayangkan adanya perdamaian di antara agama-agama, yang merupakan syarat untuk perdamaian di antara bangsa-bangsa. Artinya, tidak akan pernah ada perdamaian antar bangsa-bangsa tanpa adanya perdamaian di antara agama-agama (Küng, 1990, p. 115). Karena itu, bila toleransi antarumat beragama dipandang sebagai salah satu kuncinya maka “moderasi beragama” signifikan dan lebih efektif untuk mewujudkannya.

Meskipun radikalisme disinyalir sebagai langkah awal bagi terorisme, tapi kita mesti secara arif juga mengakui bahwa radikalisme tidaklah identik dengan terorisme. Dapat dipastikan bahwa tidak semua kaum radikal mengambil keputusan untuk menjadi seorang teroris (Koten, 2018). Radikalisme memang memungkinkan orang untuk menjadi keras terhadap diri dan sesamanya melalui aksi terorisme. Bom bunuh diri merupakan contoh nyata betapa radikalisme yang tidak disertai dengan pemikiran kritis dan visi religiusitas yang luas dan mendalam dapat membuat orang terjatuh dalam spirit “kepatuhan buta” kepada narasi-narasi keagamaan yang eksklusif dan diselewengkan oleh kelompok radikal yang diikutinya, khususnya yang diinspirasi dan dituntut oleh pemimpinnya untuk diikuti dan dijalankan secara total dan radikal (Kimball, 2003).

Terorisme merupakan ungkapan radikalisme ekstrim yang berwajah totaliter dan dehumanistik, garang, ganas, dan menakutkan sebab terencana secara sistematis dan tanpa memilah-milah sasaran. Ciri khas terorisme adalah kekerasan yang tanpa memilah-milah korban dan sasaran. Meskipun kekerasan adalah ciri yang melekat pada terorisme, tapi tidak semua kekerasan merupakan terorisme. Aksi yang dapat dipandang sebagai terorisme, kata Magnis-Suseno, “adalah tindakan kekerasan terencana dengan sasaran orang-orang yang tidak terlibat dalam

sebuah konfrontasi berkekerasan atau militer” (Suseno, 2007, p, 309). Hal itu, misalnya, tampak dalam fenomena bom bunuh diri, baik di tempat ibadah maupun di ruang publik, yang diarahkan kepada pihak-pihak yang tidak bersenjata dan tidak sedang berada dalam konfrontasi militer, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itulah yang mengemuka dalam aksi bom bunuh diri di salah satu gereja Katolik pada tanggal 21 April 2019 di Srilangka, yang menewaskan lebih dari 300 orang dan melukai ratusan jemaat Katolik lainnya yang kala itu sedang merayakan Paskah. Dapat dipastikan bahwa terorisme merupakan salah satu dampak paling berbahaya dari radikalisme karena tanpa memilah-milah sasaran aksinya yang dehumanistik (Suseno, 2007). Karena itu, radikalisme perlu dicegah sedini mungkin. Salah satu strategi untuk mencegahnya adalah melalui “moderasi beragama”. Namun, apakah yang kita maksudkan dengan istilah “moderasi beragama”?

URGENSI “MODERASI BERAGAMA” DI INDONESIA

Fakta bahwa pluralitas agama rentan terhadap konflik dan kekerasan telah dengan sendirinya memantik kesadaran reflektif dan pemikiran kritis mengenai bagaimana praksis beragama yang menjanjikan bagi kemanusiaan, di mana pun juga. Salah satu wacana yang mengemuka akhir-akhir ini adalah mengenai urgensi “moderasi beragama”. Apakah yang kita maksudkan dengan “moderasi beragama”? Di manakah letak urgensinya?

Bila kita telisik arti kata moderasi secara etimologis dan terminologis, di sana kita temukan bahwa kata tersebut berkorelasi dengan beberapa istilah di dalam beberapa bahasa seperti bahasa Latin dan Inggris. Patut diduga bahwa akar kata moderasi itu berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang pada dasarnya berarti “tidak berlebihan dan tidak berkekurangan”. Dalam arti itu, kata *moderatio* mengandung arti proporsional, cukup, dan memenuhi standar. Arti moderasi yang senada dengan arti kata *moderatio* itu kita temukan juga dalam bahasa Inggris, yakni “*moderation*” (yang diterjemahkan dengan kata moderasi dalam Bahasa Indonesia). Terjemahan untuk kata *moderation* dalam bahasa Indonesia adalah “sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan”. Persisnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008, p. 924), kata “moderasi” itu diartikan sebagai “pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman”. Kata yang senada dengan arti “moderasi” tersebut adalah “moderat”, yang berarti “selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah”. Dalam khasanah musik, misalnya, kita mengenal kata “*moderato*” yang berarti “tenang”, “dalam tempo sedang”. Kemudian, dalam kegiatan seperti seminar, *talkshow*, dll., kita juga mengenal istilah “moderator” yang berarti “orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dsb); pemimpin sidang (rapat, diskusi) yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusan masalah”, atau bila dikaitkan dengan “teknik” maka dapat diartikan sebagai “alat pada mesin yang mengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga”.

Bertolak dari pembahasan di atas, istilah “moderasi beragama” dapat diartikan sebagai visi, misi, dan rencana strategis yang relevan dan signifikan untuk “menghindari ekspresi (sikap, tindakan, dan praktik) beragama yang berlebihan, ekstrem (Arif, 2021, p. 93) atau yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan atas nama agama”. Dalam perspektif itu, “moderasi beragama” merupakan upaya untuk menginisiasi, mengikhtiarkan, dan mengedepankan peran agama sebagai sumber nilai, prinsip dan orientasi hidup dalam rangka meraih taraf kehidupan yang berkualitas lebih tinggi bahkan paling tinggi.

Bila keselamatan lahir dan batin (ketentraman, kedamaian, keutuhan diri) kini dan kelak diyakini sebagai tujuan final manusia beragama maka praksis beragama yang kontra dengan tujuan tersebut adalah yang dehumanistik karena ekstremistik. Karena itu, praksis agama perlu senantiasa bertumbuh dari dan berakar dalam pengalaman sehari-hari yang direfleksikan sampai pada tataran religiusitas, dalam arti dikaitkan dengan misteri-misteri terdalam kehidupan. Dalam konteks pluralitas, “moderasi beragama” tampak relevan dan signifikan untuk merengkuh tujuan final dan ideal agama tersebut karena justifikasinya pada toleransi dan signifikansinya untuk menolak ekstremisme.

Dalam keyakinan iman kita akan Allah, Tuhan, *God, Desu, Theos*, Gusti, Dewa sebagai “Sosok yang misteri, Mahakuasa, Maha Lain” itu, “moderasi beragama” tampak signifikan sebab menuntun kita untuk senantiasa bertumbuh dalam sikap “kedewasaan iman”, yakni iman yang mewarnai kehidupan konkret secara proporsional, iman yang memerdekakan orang dari kepicikan dan kenafian yang infantil (kekanak-kanakan). Sebaliknya, pola hidup beragama yang tertutup terhadap pluralitas dan terjebak dalam narasi-narasi intoleran hanya akan membuat iman menjadi kerdil, tidak relevan untuk memaknai pengalaman hidup konkret. Akibatnya, orang memandang dan memperlakukan agama hanya sebagai identitas sosial atau pun ritual formal. Praksis, sikap, dan pola beragama seperti itulah yang justru membuat agama akrab dengan segala bentuk ekstremisme atau berkecenderungan kepada kekerasan dan bahkan radikalisme ekstrem (terorisme).

Selain karena pengaruh indoktrinasi kerangka teologis yang mengeksklusi yang lain, faktor lainnya yang berpotensi memicu radikalisme di Indonesia adalah menyusupnya wacana intoleransi ke sektor pendidikan formal melalui aktivitas kaderisasi, siraman rohani di tempat-tempat ibadah yang dikuasai oleh kelompok radikal, penerbitan media informasi berupa majalah, booklet, buku, serta pemanfaatan berbagai jenis situs di internet (Munip, 2012: p. 159). Konon penyebaran narasi-narasi atau konten-konten intoleransi dan radikalisme melalui jalur internet termasuk yang paling efektif untuk memengaruhi kaum muda (siswa, mahasiswa) sebab mereka merupakan kelompok yang disinyalir paling aktif menggunakan sosial media seperti *instagram, twitter, facebook, dan linkedin, line, WhatsApp, telegram, youtube*, dll (Qodir, 2016, p. 434).

Tentu persoalan mendasarnya tidak terletak pada penggunaan sosial media, tetapi pada narasi-narasi atau konten-konten intoleran yang dirancang sedemikian rupa untuk dimuat dan disebarluaskan melaluinya dan ditujukan kepada siapa saja yang membacanya. Tetapi karena kaum muda pada umumnya yang disinyalir gemar membacanya maka mereka yang relatif mudah terpapar pengaruh wacana intoleransi tersebut. Bila sebagian besar pelajar atau kaum muda di Indonesia mengakses dan membaca wacana intoleransi secara intensif, tidaklah mengherankan kalau di masa yang akan datang sebagian besar kaum muda di Indonesia berpotensi berpikiran intoleran dan bersikap radikal terhadap yang lain, penganut agama lain (Widiyaningsih, dkk., 2017, pp. 208-209). Untuk saat ini, potensi tersebut antara lain mengemuka dalam menguatnya hoaks, ujaran kebencian, kekerasan verbal, dan penyebaran konten polemik berlatarbelakang pandangan keagamaan yang ditujukan kepada yang lain, agama lain. Gejala ini, bila tidak segera dicegah, berpotensi membuat agama kelak tampil sebagai aspek kehidupan yang paling rentan terhadap konflik dan kekerasan. Alih-alih menjadi sumber inspirasi untuk menyelesaikan masalah kehidupan nyata, agama malah terpuruk kualitasnya dan menjadi sumber masalah sosial.

Sekedar untuk melawan lupa, rentetan kekerasan aksi teror “berlatarbelakang agama” yang terjadi di Indonesia, setelah Bom Bali I dan II, antara lain, adalah teror bom pada tahun 2018 (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/5-kasus-teror-di-indonesia-selama-mei/ful>), yakni teror bom di Mako Brimob (9 Mei 2018) yang mengakibatkan lima anggota polisi dan satu narapidana (napi) tewas; teror bom bunuh diri di tiga lokasi Gereja (13 Mei 2018) dalam waktu yang relatif berdekatan, yakni di Gereja St. Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pentakosta Pusat Surabaya yang merenggut korban jiwa dan melukai sedikitnya 40 orang, dalam tanggal yang sama bom meledak secara tidak disengaja oleh satu keluarga teroris di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo sehingga menewaskan 3 orang dan melukai tiga anak lainnya dalam satu keluarga dan masih memiliki hubungan dengan keluarga pelaku teror bom di tiga gereja di Surabaya; selanjutnya teror bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Surabaya (14 Mei 2018) oleh anggota keluarga teroris yang mengakibatkan empat dari lima anggota pelaku bom tersebut tewas di tempat; serangan teroris ke Mapolda Riau (16 Mei 2018) yang mengakibatkan satu anggota polisi gugur dan empat teroris tewas di tempat sementara satu orang teroris melarikan diri. Dan aksi yang masih segar dalam ingatan kita adalah bom bunuh diri di Gereja Katedral Makasar pada tanggal 28 Maret 2021 yang lalu.

Semua peristiwa tragis di atas merupakan sinyal nyata bahwa secara horizontal agama sesungguhnya menyimpan potensi konflik. Fakta radikalisme ekstrem di Indonesia seperti dideskripsikan melalui beberapa peristiwa yang memilukan hati (juga menyakiti perasaan terdalam kemanusiaan) di atas dengan sendirinya menunjukkan bahwa betapa bahayanya intoleransi sebab ia menjadi akar bagi radikalisme dan terorisme. Karena itu, peran agama perlu senantiasa dilihat dari “visi dan misi divinisasinya (keilahiannya)”, yakni sebagai jalan untuk menghadirkan nilai-nilai keilahian dalam kehidupan nyata manusia. Dalam perspektif itulah “moderasi beragama” menjadi penting.

Urgensi “moderasi beragama” semakin nyata terutama ketika orang beragama kini semakin mudah memberi cap ‘atheis’, ‘agnostik’, ‘sekuler’, ‘kafir’, ‘bidah’, dsb., kepada yang lain, penganut agama lain. Orang yang moderat dalam beragama akan berpikir beribu-ribu kali atau bahkan tidak pernah berpikir untuk melontarkan kekerasan verbal untuk merendahkan orang lain, penganut agama lain. “Moderasi beragama” menyediakan ruang untuk petualangan batin sehingga orang tidak mudah terjebak dalam pikiran picik dan naif dalam beragama. Dalam batas tertentu, “moderasi beragama” menumbuhkan kecerdasan dan kemandirian individu untuk semakin bertanggungjawab dalam mengekspresikan agamanya dalam realitas yang kompleks.

Jadi, dari uraian sebelumnya, terlihat dua alasan utama bagi pentingnya moderasi beragama. *Pertama*, kondisi intoleransi sebagai akar radikalisme. Dalam konteks perbedaan dan keragaman, intoleransi berbahaya karena menafikan keunikan demi memaksakan keseragaman dalam kenyataan. Bila tidak segera dicegah dengan moderasi beragama maka praksis beragama justru rentan terhadap ekstremisme berupa kekerasan dan bahkan terorisme. *Kedua*, kondisi pluralitas yang berpotensi intoleransi biasanya terkait dengan klaim kebenaran sehingga pihak yang lain, agama lain dipandang salah hanya karena berbeda sumber ajaran atau dogma dan Kitab Suci. Urgensi moderasi beragama terletak pada fakta bahwa kondisi intoleransi dalam pluralitas yang mengemuka dalam klaim kebenaran justru meredupkan pancaran keluhuran agama-agama yang mengafirmasi bahwa Kebenaran Yang Ilahi itu senantiasa melampaui rasionalitas manusia sehingga memungkinkan untuk didekati dan dipahami dari perbedaan perspektif, dipraktikkan

secara lentur, cair, dan rileks. “Moderasi beragama” memungkinkan orang untuk melihat yang *lyan*, penganut agama lain bukan sebagai ancaman atau lawan tapi sebagai peluang dan kawan seperjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai agama dalam kenyataan, kini dan di sini, untuk kemudian berikhtiar kepada kehidupan akhirat atau dunia “*life after life*”.

KESIMPULAN

“Moderasi beragama” menjadi penting karena lebih efektif untuk mencari jalan tengah yang menawarkan “*win-win solution*” untuk setiap masalah keagamaan yang dihadapi bersama. Dalam konteks pluralitas agama di Indonesia, “moderasi beragama” signifikan dan relevan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Landasan implementasi “moderasi beragama” di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang secara implisit dan eksplisit menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks pluralitas agama yang akhir-akhir ini rentan terhadap klaim kebenaran yang memicu konflik dan kekerasan, “moderasi beragama” menjadi kebutuhan atau bahkan keharusan terutama untuk mengupayakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa yang diliputi oleh keindahan dan kedamaian.

Bila agama diyakini sebagai sumber imajinasi kreatif dan inspirasi nilai yang konstruktif untuk kemanusiaan global, yakni: kasih sayang, kebijakan, kerendahan hati, kemurahan hati, cinta damai, kejujuran, keadilan, dll., maka nilai-nilai agama itu lebih efektif diraih dan diimplementasikan melalui praksis “moderasi beragama”. Hanya pola beragama macam itu yang memungkinkan orang untuk menyadari bahwa ujaran kebencian/caci maki dan hoaks, kekerasan, penindasan, dan bahkan pembunuhan dan pembantaian atas nama agama adalah sebuah kekeliruan besar atau bahkan kegagalan paling parah dalam menalar dan memaknai agama.

Kita dapat meyakinkan diri bahwa agama akan tetap dibutuhkan dan relevan untuk segala jaman manakala ekspresinya memberi manfaat kepada manusia dan kemanusiaan global (mencegah orang dari kejahatan, menjauhkan orang dari sikap kekanak-kanakan dan tindakan yang patologis). Untuk itu, “moderasi beragama” menjadi kata kunci bagi agama di masa depan dan jaminan umat manusia menuju kondisi *humanum religiosum*.

REFERENSI

- Arif, Khairan M. 2021. *Konsep dan Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia*. Al-Risalah, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 12, Nomor 1, 90-106.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, p. 53.
- Ali, Mukti. 1971. *Agama: Universitas dan Pembangunan*. Bandung: Badan Penerbit IKIP.
- Arendt, Hannah. 1958. *The Human Concition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Arendt, Hannah. 1951. *The Origins of Totalitarianism*. New York: A Harvest Book, Harcourt Inc.
- Armstrong, Karen. 2002. *Islam A Short History*. Yogyakarta: IKON TERALITERA.

- Bagus, Lorens. 1996. *KAMUS FILSAFAT*. Jakarta: Gramedia.
- Cross, Remi, & Snow, David. A, "Radicalisme Within the Context of Social Movements: Processes and Types", *Journal of Strategic Security*, Volume 4, no.4 (2012), 115-130.
- Daven, Mathias, "Memahami Pemikiran Ideologis Dalam Islam Radikal", *Ledalero*, Volume. 17, No. 7 (Juni 2018), 1412-5420.
- Dejaeghere Y, Hooghe M & Claes E, "Do ethnically diverse schools reduce ethnocentrism? A two-year panel study among majority group late adolescents in Belgian schools", *International Journal of Intercultural Relations*, 36 (1), 2012, 108-117.
- DEPDIKNAS. 2008. *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA PUSAT BAHASA, Edisi Keempat*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dunlop, Knight, "*Religion, its Functions in Human Life: A study of Religion from the Point of view of Psychology*", New York : Paulist Press, 1946.
- Durkheim, Emile. 1992. *The Elementary Forms of the Religious Life*. New York: Free Press.
- Eliade, Mircea. 1987. *The Encyclopedia of Religion, Volume 12*. New York, NY 10022: Macmillan Publishing Company, 866 Third Avenue.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York : Basic Books and Harper Torchbooks.
- Go, Piet. 1982. *Keutamaan Teologal & Keutamaan Religi*. Malang: STFT Widya Sasana.
- Hendropuspito, D. 1983. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heuken, Adolf. 1991. *ENSIKLOPEDI GEREJA, IA-G*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.
- Ilyasin, Mukhammad., Abzar, D. M., & Mohammad, Kamaluddin. 2017. *TERORIS DAN AGAMA: Konstruksi Teologi Teoantroposentris*. Jakarta: KENCANA.
- James, William. 1985. *The Varieties of Religious Experience*, New York: New American Library.
- Janmaat, J. G., & Keating, Avril. 2019. *Are today's youth more tolerant? Trends intolerance among young people in Britain*, *Ethnicities*, London: UCL Institute of Education, UK, Volume 19 (1), 44-65.
- Kimball, Charles. 2003. *Kala Agama Jadi Bencana*. Bandung: Mizan.
- Knitter, Paul F. 1985. *No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes towards World Religions*. Maryknoll, NY: Orbis Books.
- Koten, Yosef Keladu. 2018. *Kampanye Strategis Melawan Radikalisme: Merancang Model Pendidikan Multikultural*. *Jurnal Ledalero*; Volume 17, Nomor 1, 3-26.
- Küng, Hans. 1990. *Towards a World Ethic of World Religions*, dalam "The Ethic of World Religions and Human Rights", *Concilium* 1990/2. London: SCM Press.
- Lubis, Elfahmi, Pemetaan Pola Penyebaran Paham Radikalisme Di Kalangan Pelajar Kota Bengkulu (Sebuah Analisis Teoritis), *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Vol. 1 No. 1 Maret 2021.

- Mahfudh, Shofiyah & Asril Putra, Hika. D. 2010. *Melawan Doktrin Sesat Terorisme*. Tangerang: INTIMEDIA.
- Maslow, Abraham H. 2000. *Agama, Nilai, Dan Pengalaman Puncak*. Ende: LPBAJ Arnoldus.
- Munip, Abdul, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Volume I, No. 2 (Desember 2012), 159-181.
- Naim, Ngainun, "Deradikalisasi Berbasis Nilai-Nilai Pesantren Studi Fenomenologis di Tulungagung", *AKADEMIKA*, Volume 22, Nomor 01, Januari-Juni 2017, 129-152.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Nye, Malory. 2003. *Religion The Basics*. London: Routledge.
- O'Dea, Thomas. F. 1983. *The Sociology of Religion*. New Jersey : Prentice-Hall Inc., Englewood Clift.
- Partanto, Pius A., Dahlan, Al-Barry M. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Qodir, Zuly, "Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama", *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 5, No. 1 (Mei 2016), 429-445.
- Rapp, Carolin & Freitag, Markus, *Teaching Tolerance? Associational Diversity and tolerance Formation, Political Studies*, Bern: University of Bern, Volume 63, (December 2015) 1031-1051.
- Riyanto, Eko Armada. 2010. *Dialog Interreligius, Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rokhmad, Abu. 2012. *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*. Laporan Penelitian Universitas Negeri Semarang.
- Ro'uf, A. M. 2007. Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru. *Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman Institut Agama Islam Negeri Mataram*, Volume XI Nomor 1 Juni 2007, 157-176. doi:10.20414/ujis.v11i1.425.
- Rundell, Michael, "Macmillan English Dictionary for Advance learners", Oxford: Macmillan Education, 2002.
- Salenda, Kasjim, "Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009. URI: <http://repositori.uin.alauddin.ac.id/id/eprint/198>
- Saliba, John A. 1976. *Homo Religius' In Mircea Eliade, An Anthropological Evaluation*. Leiden: E.J. Brill.
- Samho, Bartolomeus, dkk. 2019. *Agama dan Kesadaran Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius.
- Schillebeeckx, Edward. 1990. *The Church: The Human Story of God*. New York: Crossroad.
- Soekarno. 1964. *Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: panitia nasional peringatan lahirnya Pantja Sila 1 Djuni 1945 -1 Djuni 1964.
- Suseno, Franz-Magnis. 2007. *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*. Jakarta: Kompas.

Vogt, WP. 1997. *Tolerance and Education: Learning to Live with Diversity and Difference*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Wach, Joachim. 1994. *Ilmu Perbandingan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widyaningsih, Ridha, Sumiyem, S, Kuntarto, K. 2017. *The Potential of Religious Radicalism Movement in Banyumas*. Walisongo, Volume 25, No. 1, 203-230.

Zuhadi, Muhammad Harifin. Januari-Juni 2017. *Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan*. AKADEMIKA, Volume 22, No. 01. 199-224.

Zulfadli. Januari-Juni 2017. *Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia*. AKADEMIKA, Volume 22, No. 01, 173-198.

SUMBER INTERNET

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/5-kasus-teror-di-indonesia-selama-mei/5> (retrived 20 Februari 2022).

<http://www.penaraka.com/2012/04/pengertian-agama.html>

(<https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/5-kasus-teror-di-indonesia-selama-mei/ful>),

(<https://20.detik.com/detikflash/20191105-191105003/bnpt-jelaskan-ciri-ciri-orang-yang-terpapar-radikalisme>).